

RENCANA KERJA SKPD TA. 2025

PENYAJIAN DOKUMEN RENJA



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANJARBARU**

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran rencana tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Rencana kerja BPBD Kota Banjarbaru disusun sebagai salah satu dokumen perencanaan dan pedoman bagi BPBD sesuai visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, dan diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan terutama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana di Kota Banjarbaru. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan target pada renstra, RKPD, RPJM Daerah dan prioritas program pembangunan daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dilingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru yang telah menyusun dokumen rencana kerja tahun 2024 ini. Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik BPBD Kota Banjarbaru pada tahun 2025, untuk menghadapi dan mencari solusi atas permasalahan kebencanaan di Kota banjarbaru sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Banjarbaru. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Banjarbaru, Januari 2025
Kepala BPBD Kota Banjarbaru

ZAINI, S.Sos, MM
Pembina utama muda
NIP: 19701009 200003 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.3.1 M a k s u d.....	8
1.3.2 T u j u a n	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	10
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPBD PERUBAHAN TAHUN LALU	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru	32
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru	33
2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	34
BAB III	36
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU	36
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD	36
3.4 Program dan Kegiatan.....	39
BAB IV.....	42
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42
KOTA BANJARBAR	42
BAB V	43
PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung SKPD.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dituangkan ke dalam 3 (tiga) jenis dokumen perencanaan yang terkait satu sama lain yang harus dijamin konsistensinya. Dokumen pertama adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan dua puluh tahunan, yang kedua adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan dan yang ketiga adalah Dokumen Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja perubahan pemerintah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan dokumen Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran serta menunjukkan prakiraan maju sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan tahunan daerah, sehingga diharapkan menghasilkan perencanaan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu serta harus menjamin keterkaitan dan konsistensi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahap terakhir dari RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026. Sedangkan RPJMD 2021-2026 sendiri adalah pelaksanaan 5 (lima tahun) ke-4 dari RPJPD Kota Banjarbaru 2005-2025. Selain berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD, penyusunan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2025 ini juga merujuk

kepada dokumen-dokumen perencanaan baik di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan seperti RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan maupun tingkat nasional yaitu RKP Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Serta Uraian Tugas Jabatan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sudah melaksanakan kebijakan pada Bidang- bidang yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

Adapun mekanisme penyusunan Renja SKPD dimulai dari penyerapan indikator kinerja program dan kegiatan dan target yang akan dicapai oleh Bidang yang melaksanakan program dan kegiatan dengan tetap mengacu kepada Renstra SKPD, Rancangan Awal RKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dan kesesuaian dengan Renja K/L dan Renja SKPD Propinsi.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
14. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1) ;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20);
26. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 M a k s u d

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan pembangunan tahunan daerah dan menghasilkan perencanaan pembangunan tahunan yang bermutu, akuntabel dan tepat waktu serta sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD.

1.3.2 T u j u a n

Berdasarkan maksud diatas, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 bertujuan :

1. Menjabarkan program/kegiatan prioritas kedalam strategi yang jitu, arah kebijakan yang fokus secara terinci dan terukur sehingga dapat diimplementasikan.
2. Sebagai landasan acuan penetapan indikator kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan.
3. Membangun profesionalisme aparatur yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dengan etos kerja melayani.
4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Kepala Pelaksana – Kasubbag Tata Usaha dan Kasubbid - Kasubbid yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah KotaBanjarbaru Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU**
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU**
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru
 - 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- BAB IV : RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU**

- BAB V : PENUTUP**

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPBD PERUBAHAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Bahwa Tahun Anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru melaksanakan 2 (dua) Program dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7,372,300,660

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, berdasarkan program yang dilaksanakan tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 1
Evaluasi Program Tahun Anggaran 2024

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Kinerja
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.983.078.900	Rp 5.813.085.839	-
2	Penanggulangan Bencana	Rp 5.432.814.100	Rp 4.632.847.725	-

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tahun 2024 *(tahun lalu) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini. Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2 dengan format tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota Banjarbaru

Nama Perangkat Daerah : BPBD Kota

Banjarbaru

Lembar :

1	2	3	4	5	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			9	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023(n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
	Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB	100%	BB	BB	
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-

-	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2024(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023(n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Daerah	dalam kondisi baik								
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	100%	28 unit	28 unit	100%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	-	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	100%
	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase informasi rawan bencana yang tersampaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 org	200 org	200 org	200 org	100%	200 org	200 org	100%
	- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase tertanganinya korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	5 kawasan	5 kawasan	5 kawasan	5 kawasan	100%	5 kawasan	5 kawasan	100%
	- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	200 orang	-	-	-	-	-	-	-

-	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022(n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan tahun 2024(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2023(n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024(n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1dokumen	1dokumen	1dokumen	1dokumen	100%	1dokumen	1dokumen	100%
	- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
	- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	75org	75org	75org	75org	100%	75org	75org	100%
	- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2dok	2dok	2dok	2dok	100%	2dok	2dok	100%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang terselamatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5319org	-	-	-	-	-	-	-
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang tertata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
	- Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025**

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t Akhir Perio de Rens tra OPD	Realis asi Capai an RENJ A OPD Tahu n 2023	Prakir aan Capaia n Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasio nal	Daerah		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							10.408.545.394,00	10.551.885.710,00	12.298.302.130,00					9.716.020.687,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.408.545.394,00	10.551.885.710,00	12.298.302.130,00					9.716.020.687,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10.408.545.394,00	10.551.885.710,00	12.298.302.130,00					9.716.020.687,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				AA Nilai 100%	AA Nilai 100%	5.921.685.994,00	6.123.026.310,00	6.857.437.030,00					5.330.089.487,00	
Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	-			100%	100%	205.864.000,00	205.864.000,00	205.864.000,00			-	4.Meningka tkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	149.190.000 ,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokume n	7 Dokume n	44.096.000,00	44.096.000,00	59.096.000,00	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan	8.750.000,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH

										Semua Kel/Des a			Inklusif		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokume n	1 Dokume n	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tka Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokume n	1 Dokume n	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tka Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokume n	1 Dokume n	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tka Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	161.768.000, 00	161.768.000, 00	208.668.000, 00	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tka Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	140.440.000 ,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tka Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH

										Semua Kel/Des a			Inklusif		
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah															
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				-	1 Dokume n	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	-			100%	100%	3.136.964.994,00	3.364.813.310,00	3.364.813.310,00			-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	3.766.771.887,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	3.060.318.494,00	3.293.166.810,00	3.718.028.980,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	3.716.771.887,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokume n	1 Dokume n	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	34.673.500,00	34.673.500,00	34.673.500,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	41.973.000,00	36.973.000,00	42.973.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang yang Difasilitasi	-			100%	100%	35.000.000,00	17.942.000,00	17.942.000,00			-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	17.942.000,00	17.942.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan kepegawaian yang disusun sesuai ketentuan	-			100%	100%	171.950.000,00	171.950.000,00	171.950.000,00			-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	215.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	96.950.000,00	96.950.000,00	96.950.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang	140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

										tan, Semua Kel/Des a			Adaptif dan Inklusif		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10 Orang	10 Orang	75.000.000,0 0	75.000.000,0 0	75.000.000,0 0	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tka Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	75.000.000, 00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	-			-	-	505.023.000, 00	495.673.000, 00	495.673.000, 00			-	4.Meningka tka Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	303.839.700 ,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	189.441.000, 00	189.441.000, 00	189.441.000, 00	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tka Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,0 0	50.000.000,0 0	33.366.550,0 0	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tka Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	37.839.700, 00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				3 Dokume n	3 Dokume n	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tka Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	6.000.000,0 0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH

										a					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	244.982.000,00	235.632.000,00	456.495.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	245.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	-			100%	100%	364.662.000,00	364.662.000,00	364.662.000,00			-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	140.301.000,00	140.301.000,00	140.301.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Mebel															
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	120.924.000,00	120.924.000,00	120.893.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	103.437.000,00	103.437.000,00	103.437.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	-			100%	100%	350.750.000,00	350.750.000,00	350.750.000,00			-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	12.600.000,00	Kota Banjarbaru,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	4.Meningkatkan Tata Kelola	0,00	BADAN PENANGGULANGAN

	Daya Air dan Listrik yang Disediakan									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD)		Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif		BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	347.250.000,00	347.250.000,00	347.250.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	-			100%	100%	1.151.472.000,00	1.151.372.000,00	1.151.372.000,00			-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	807.287.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	47.942.000,00	47.942.000,00	47.942.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	47.943.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	677.970.000,00	677.970.000,00	677.970.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	578.144.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

										Semua Kel/Des a			Inklusif		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	377.560.000,00	377.460.000,00	397.310.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	181.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat				100 %	100 %	4.486.859.400,00	4.428.859.400,00	5.440.865.100,00					4.385.931.200,00	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase informasi rawan bencana yang tersampaikan	-			100 %	100 %	250.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00			-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)															
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				200 Orang	525 Orang	250.000.000,00	245.000.000,00	304.100.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota															

	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 Dokume n	0 Dokume n	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase tertanganinya korban bencana	-			100 %	100 %	1.523.973.10 0,00	1.500.973.10 0,00	1.500.973.10 0,00			-	4.Meningka tkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	1.576.488.8 50,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota															
	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota															
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				1 Unit	7 Unit	307.475.000, 00	632.475.000, 00	1.262.469.00 0,00	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota															
	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	76.740.000,0 0	66.740.000,0 0	60.100.000,0 0	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	79.000.000, 00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam															
	Jumlah Keluarga yang				50	50	30.000.000,0	30.000.000,0	30.000.000,0	Kota	PENDAPA	-	4.Meningka	30.000.000,	BADAN

	Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				Keluarga	Keluarga	0	0	0	Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TAN ASLI DAERAH (PAD)		tkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	00	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana															
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				2 Kawasan	1 Kawasan	240.000.000,00	240.000.000,00	141.110.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota															
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				24 Orang	24 Orang	22.759.500,00	22.759.500,00	22.759.500,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota															
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0 Dokumen	170.001.000,00	0,00	0,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota															
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				2 laporan	1 laporan	567.000.000,00	242.000.000,00	291.999.950,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	1.033.976.450,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota															
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 Dokume n	1 Dokume n	0,00	170.001.000, 00	170.001.000, 00	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota															
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				5 Kawasan	5 Kawasan	109.997.600, 00	96.997.600,0 0	96.997.600,0 0	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	153.512.400 ,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang terselamatkan	-			100 %	100 %	1.893.142.00 0,00	1.893.142.00 0,00	1.893.142.00 0,00			-	4.Meningka tkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	1.723.132.0 00,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota															
	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				7 Dokume n	7 Dokume n	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	97.200.000, 00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota															
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				3748 Orang	3748 Orang	1.574.657.00 0,00	1.574.657.00 0,00	1.777.157.00 0,00	Kota Banjarb aru, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningka tkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	1.225.932.0 00,00	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota															

	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				150 Orang	150 Orang	318.485.000,00	318.485.000,00	428.185.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang tertata	-			100 %	100 %	819.744.300,00	789.744.300,00	789.744.300,00			-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	836.310.350,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota															
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	579.877.000,00	495.677.000,00	473.177.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	527.321.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota															
	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota															
	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	124.867.300,00	194.067.300,00	281.761.300,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	100.988.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota															
	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				40 Lembaga	40 Lembaga	55.000.000,00	45.000.000,00	65.850.000,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	58.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota															
	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota															
	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				5 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	55.000.000,00	35.197.750,00	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4.Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Adaptif dan Inklusif	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							10.408.545.394,00	10.551.885.710,00	12.298.302.130,00					9.716.020.687,00	

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
BPBD KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025 TRIWULAN I**

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra (Tahun 2025)	Target PK (Tahun 2025)	Anggaran	Triwulan I				Penanggung Jawab	Catatan Analisis & Evaluasi
								Anggaran		Kinerja			
								Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Target	Realisasi		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						Rp 4.338.667.150	Rp 1.347.044.250	Rp 585.269.500			Kepala BPBD Kota Banjarbaru	
1.05.03.2.01	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KAB/KOTA		Indikator Kinerja Program Disini	Persentase	100	100	Rp 218.400.000	41.385.000	Rp 18.129.000			Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	200	200	Rp 218.400.000	41.385.000	Rp 18.129.000	-	-	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
1.05.03.2.02	KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA		Indikator Kinerja Program Disini	Persentase	100	100	Rp 1.468.833.100	123.720.000	Rp 95.522.000			Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	5	5	Rp 86.997.600	17.580.000	Rp -	-	-	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan Rawan Bencana(Per Jenis Ancaman Bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kab/Kota Yang Memiliki Mekanisme dan Prosedur Tetap Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Kawasan	2	2	Rp 240.000.000	-	Rp -	-	-	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	

1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	1	1	Rp 632.475.000	36.340.000	Rp 31.340.000	1	1	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	1	1	Rp 242.000.000	69.800.000	Rp 64.182.000	-	-	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Warga Negara Yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan untuk Menguji Efektivitas SOP dan Keberfungsian Sarana Prasarana dalam Pengendalian Operasi Penanganan Darurat Bencana (Per Jenis Ancaman) Kab/Kota	Orang	200	200	Rp 50.100.000	-	Rp -	-	-	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	Rp 170.001.000	-	Rp -	-	-	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	24	24	Rp 19.759.500	-	Rp -	-	-	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	50	50	Rp 27.500.000	-	Rp -	-	-	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
1.05.03.2.03	KEGIATAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA		Indikator Kinerja Program Disini	Persentase	100	100	Rp 1.893.142.000	740.487.000	Rp 338.691.000			Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	150	150	Rp 318.485.000	245.930.000	Rp 64.134.000	-	-	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	3748	3748	Rp 1.574.657.000	494.557.000	Rp 274.557.000	3748	2230	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	
1.05.03.2.04	KEGIATAN PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA		Indikator Kinerja Program Disini	Persentase	100	100	Rp 758.292.050	441.452.250	Rp 132.927.500			Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
1.05.03.2.04.0003	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	Rp 493.177.000	308.212.500	Rp 36.452.500	-	-	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan	Kegiatan	1	1	Rp 189.067.300	98.307.000	Rp 96.475.000	-	-	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	

			Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan										
1.05.03.2.04.001 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat & Dunia Usaha Dalam Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota		Jumlah Keterlibatan Kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Penanganan PascaBencana Kab/Kota Melalui Lembaga Non Pemerintah Antara Lain : Lembaga Filantropi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Organisasi Relawan, Perguruan Tinggi, Media Massa dan Dunia Usaha yang Telah Terdaftar dan Legal	Lembaga	40	40	Rp 40.850.000	14.735.000	Rp	-	-	-	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.05.03.2.04.001 6	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota		Jumlah Penyelesaian Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM Sub Urusan Bencana Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (Satu) Tahun	Dokumen	5	5	Rp 35.197.750	20.197.750	Rp	-	-	-	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang disusun dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*.

Analisis kinerja pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik dengan mengakomodir permasalahan dan kebutuhan dari setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD
Provinsi/Kabupaten/Kota Banjarbaru

[illegible]

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru
Terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan
Tata Kerja SKPD, isu – isu penting yang terkait dengan hal tersebut adalah :

No.	AKAR MASALAH	Isu Strategis
	Belum Optimalnya Pengelolaan Risiko Bencana yang Efektif dan Efisien	1. Masih tingginya intensitas bencana

Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi pelayanan melalui elektornik/internet dalam blog : bpbd.banjarbarukota.go.id dapat menggambarkan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan yang telah diberikan dan memberi informasi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pegawai serta menampung dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan pengembangan aparatur formulasi isu-isu penting berupa usulan, rekomendasi dan catatan yang strategis dapat ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Perubahan disusun berpedoman pada RPJMD kota, Rencana Kerja Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional, dan Pedoman Penyusunan RKPD. Rencana kerja Perubahan merupakan dokumen yang disusun sebagai arahan kepada SKPD dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berfungsi sebagai koridor perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu sampai akhir tahun anggaran periode 2025 yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Hasil analisis terhadap Rencana Kerja Perubahan dibandingkan dengan kebutuhan menunjukkan perlunya penyesuaian-penyesuaian baik dalam bentuk pengurangan maupun penambahan beberapa kegiatan maupun terkait dengan sasaran lokasi, dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan kegiatan maupun pertimbangan teknis sasaran lokasi.

Perbandingan Program/Kegiatan berdasarkan dokumen Rencana Kerja Perubahan dan hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada table berikut:

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	PKebutuhan dana	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BJB	100%	250.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BJB	100%	250.000.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BJB	100%	1.174.269.600	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BJB	100%		
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan tertanganinya korban bencana	BJB	100%	1.893.142.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan tertanganinya korban bencana	BJB	100%	1.893.142.000	
	Penataan Sistem Dasar	Cakupan terdatanya korban	BJB	100%	819.744.300	Penataan Sistem Dasar	Cakupan terdatanya korban	BJB	100%	819.744.300	

	Penanggulangan Bencana	bencana yang terdampak				Penanggulangan Bencana	bencana yang terdampak				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD yang resfonsif gender	BJB	100%	202.864.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD yang resfonsif gender	BJB	100%	202.864.300	
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	BJB	100%	473.839.000	Administrasi umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	BJB	100%	473.839.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	BJB	100%	3.133.974.994	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	BJB	100%	3.133.974.994	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	BJB	100%	320.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	BJB	100%	320.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae	Meningkatnya jasa jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	BJB	100%	358.128.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae	Meningkatnya jasa jasa penunjang urusan pemerintah daerah	BJB	100%	358.128.700	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparaturdalam kondisi baik	BJB	100%	1.106.087.946	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparaturdalam kondisi baik	BJB	100%	1.106.087.946	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BJB	100%	35.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BJB	100%	35.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan disiplin aparatur	BJB	100%	171.950.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan disiplin aparatur	BJB	100%	171.950.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Kajian usulan program dan kegiatan Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja SKPD.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rangka pengembangan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan sifatnya tidak ada perubahan,

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;Sajikan Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Nama Perangkat Daerah : BPBD Kota Banjarbaru

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Banjarbaru	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	100%	

	Adminstrasi keuangan perangkat daerah	Banjarbaru	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	
	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Banjarbaru	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	100%	
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Banjarbaru	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	100%	
	Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banjarbaru	Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi	100%	
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Banjarbaru	Meningkatnya sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	
	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Banjarbaru	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	
	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Banjarbaru	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	
	Kegiatan pelayanan dan evakuasi korban bencana	Banjarbaru	Cakupan tertanganinyakorban bencana	100%	
	Kegiatan system dasar penanggulangan bencana	Banjarbaru	Cakupan terdatanya korban bencana yang terdampak	100%	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan berjalannya upaya – upaya penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana sehingga terbentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2008 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk di Tingkat Daerah bertugas mengurus dan merencanakan program – program penanggulangan bencana di tingkat daerah dengan berpedoman pada aturan – aturan yang sudah ada.

Berdasarkan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional terdapat 7 (Tujuh) point, poin yang ke empat adalah **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim**. Arah kebijakan tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. arah kebijakan tersebut menjadi pedoman rujukan dalam penyusunan program – program yang tertuang di dalam RPJM Daerah maupun Rencana Strategis SKPD BPBD dan Instansi yang terkait lainnya yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD

Visi dan Misi SKPD

Visi pembangunan daerah dalam RJPMD kota Banjarbaru Tahun 2025 – 2030 merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarbaru, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2025 – 2030 adalah :

Visi : Banjarbaru Emas (Menjadikan Banjarbaru yang **Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera** (EMAS) melalui empat pilar program unggulan).”

Visi pembangunan kota banjarbaru 2025 – 2030 tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah tahun 2025 – 2030 yakni :

“ TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA EMPAT DIMENSI YANG MANDIRI DAN TERDEPAN”. yakni Kota pendidikan, Kota jasa, Industri dan perdagangan, Kota permukiman dan Kota Pamerintahan yang mandiri dan terdepan.

BANJARBARU MAJU adalah cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

BANJARBARU MAJU lebih kepada jawaban terhadap tujuan prioritas yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah tahap ke V RPJPD Kota Banjarbaru tahun 2021 – 2025 yakni mewujudkan Banjarbaru sebagai daerah terdepan di Kalimantan Selatan, terutama dibidang pendidikan, perdagangan, industri pengolahan dan jasa, pemerintahan dan permukiman.

BANJARBARU AGAMIS dapat dimaknai bahwa masyarakat kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur

BANJARBARU SEJAHTERA Sebagai prioritas dalam visi pembangunan kota Banjarbaru 2021-2025 hal ini sudah sesuai dengan tujuan RPJPD Kota Banjarbaru 2005 – 2025 yakni masyarakat / SDM yang berkualitas, menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis serta pemerintahan yang baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya upaya apa yang harus dilakukan . Dalam suatu dokumen perencanaan. Rumusan misi sangat penting untuk memberikan kerangka tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dicapai visi serta perubahan pradigma dan kondisi yang dihadapi pada masa yang akan datang dalam mewujudkan visi pembangunan kota Banjarbaru tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan misi pembangunan kota Banjarbaru Tahun 2025 – 2030 yaitu sebagai berikut :

- 1.mewujudkan banjarbaru yang bersosial dan budaya
- 2.mewujudkan pengembangan ekonomi
- 3.memperkuat tata Kelola pemerintahan menuju pelayanan public yang cepat, tepat responsive dan transparan
- 4.mewujudkan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung yang berkualitas dan ramah lingkungan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan . Perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Kota Banjarbaru untuk preode tersebut. Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang diperlukan untuk mencapai visi melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, Rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka lima tahun kedepan.

Berkaitan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 -2030, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi BPBD Kota adalah misi yaitu *“MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN MENUJU PELAYANAN PUBLIC YANG CEPAT, TEPAT RESPONSIVE DAN TRANSPARAN”*

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BPBD Kota Banjarbaru, dengan dokumen RPJMD 2025 – 2030, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BPBD Kota Banjarbaru harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BPBD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi dan misi BPBD Kota Banjarbaru tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

- MISI : memperkuat tata Kelola pemerintahan menuju pelayanan public yang cepat, tepat responsive dan transparan
- Tujuan-1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya
- Sasaran-1 : Meningkatnya penanganan kebencanaan
- Program :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

2. Program penanggulangan bencana

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi	Target
					2024	2025
1.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya penanganan kebencanaan	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap	100 %	100 %

3.4 Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2025 adalah 2 (dua) program yaitu

1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
 - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - i. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ii. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - iii. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - iv. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - v. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - vi. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - vii. Sub kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
 - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - i. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - iii. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahunSKPD
 - iv. Sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 - v. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuanganbulanan/triwulanan/semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - i. Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - i. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - ii. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - i. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ii. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - iii. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - iv. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - v. Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ii. Sub kegiatan Pengadaan Mebel
 - iii. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - iv. Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- v. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - iii. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - i. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - ii. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - iii. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - iv. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - v. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - i. Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
 - ii. Sub kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - i. Sub kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - ii. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
 - iii. Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
 - iv. Sub kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 - v. Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - vi. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - vii. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
 - viii. Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - ix. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - x. Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- i. Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

ii. Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban
Bencana Kabupaten/Kota

iii. Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana Kabupaten/Kota
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- i. Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

ii. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota

iii. Sub kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

iv. Sub kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan
Pascabencana Kabupaten/Kota

v. Sub kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaanTabel
T-C.33, yaitu sebagai berikut:Tabel 6.

Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : BPBD Kota Banjarbaru

lembar dari

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/ kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	PKebutuhan dana	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BJB	100%	250.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BJB	100%	250.000.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BJB	100%	1.174.269.600	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BJB	100%		
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan tertanganinya korban bencana	BJB	100%	1.893.142.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan tertanganinya korban bencana	BJB	100%	1.893.142.000	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan terdatanya korban bencana yang terdampak	BJB	100%	819.744.300	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan terdatanya korban bencana yang terdampak	BJB	100%	819.744.300	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD yang resfonsif gender	BJB	100%	202.864.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD yang resfonsif gender	BJB	100%	202.864.300	
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	BJB	100%	473.839.000	Administrasi umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	BJB	100%	473.839.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	BJB	100%	3.133.974.994	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	BJB	100%	3.133.974.994	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	BJB	100%	320.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparatur	BJB	100%	320.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae	Meningkatnya jasa jasa penunjang urusan pemerintah daerah	BJB	100%	358.128.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae	Meningkatnya jasa jasa penunjang urusan pemerintah daerah	BJB	100%	358.128.700	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparaturdalam kondisi baik	BJB	100%	1.106.087.946	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana prasarana aparaturdalam kondisi baik	BJB	100%	1.106.087.946	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BJB	100%	35.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BJB	100%	35.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan disiplin aparatur	BJB	100%	171.950.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan disiplin aparatur	BJB	100%	171.950.000	

BAB IV

RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang terukur dan output rencana kerja adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru selain menjadi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2025 oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru berfungsi juga sebagai sarana peningkatan kinerja serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik dimasa akan datang.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kota Banjarbaru menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan khususnya pembangunan manusia terkait dengan pengembangan aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dalam menciptakan Good Governance.

Banjarbaru, Juni 2025
Kepala Pelaksana BPBD,
Kota Banjarbaru

Zaini, S.Sos,MM
Pembina utama muda
NIP. 19701009 200003 1 004